

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Definisi Sekolah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah merupakan bangunan atau lembaga yang memiliki kegiatan berupa belajar mengajar serta tempat menerima dan memberikan ilmu pendidikan. Menurut Zaitun (2015) sekolah merupakan sebuah sistem organisasi pendidikan yang bersifat formal, karena dalam menjalankan fungsi dasarnya yaitu sebagai berlangsungnya proses pembelajaran, proses penanaman dan pengembangan potensi individu manusia membutuhkan pengelolaan. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan sebuah sekolah dapat menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, dan dapat memberikan kontribusi yang kuat terhadap pembangunan bangsa. Sekolah juga mengandung dua makna, yaitu secara fisik dan non fisik. Secara fisik sekolah merupakan sebuah bangunan gedung yang terdiri dari beberapa ruang belajar atau dalam sudut pandang lain ialah material, sedangkan secara non fisik, sekolah terdiri dari sistem-sistem hubungan antara tenaga pendidik (guru, pelatih, dan lainnya) dengan yang diajar atau dididik (peserta didik).

2.1.2 Sejarah Sekolah

Daulay yang dikutip oleh Asri (2017) menyebutkan bahwa sekolah di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1617 di Jakarta, yaitu pada masa VOC.

Dahulu para penjajah mendirikan sekolah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga kerja Indonesia. Sistem pendidikan sekolah juga diatur sesuai dengan kekuasaan para penjajah, namun ketika Indonesia telah merdeka sistem pendidikan pada sekolah dapat dikelola sendiri. Sekolah di Indonesia bersifat formal dengan adanya peraturan atau dapat dikatakan dengan sistem pendidikan, salah satunya yaitu terdapat kurikulum yang diatur dan dibuat oleh pemerintah dalam undang-undang khusus. Melalui kurikulum tersebut sekolah dapat menjadi salah satu objek pengembangan kemampuan masyarakat, di mana hal tersebut merupakan tujuan utama dari adanya sekolah.

2.1.3 Fungsi Sekolah

Menurut Weber yang dikutip oleh Nanang (2017) menyebutkan bahwa sekolah mampu mendidik seseorang agar dapat berpikir ke arah kehidupan modern. Menurut Werfhost (2014) mengatakan bahwa hal ini dapat dicapai apabila melalui; pertama, membagi setiap anak sesuai bakat dan minat mereka sehingga mereka mampu menggapai cita-citanya sesuai dengan jalur yang mereka pilih dan mampu. Kedua, semua anak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa membedakan golongan atau status sosial mereka, maka dari itu pemerintah juga harus memastikan kesempatan tersebut agar tujuan dapat tercapai.

Nanang (2017) menjelaskan bahwa sekolah memiliki fungsi sebagai salah satu alat untuk menjadikan masyarakat lebih aktif dalam berpartisipasi, dengan kata lain pendidikan harus berkontribusi dalam menyiapkan individu menjadi warga

negara yang aktif. Sekolah memiliki peran penting dalam hal ini, karena mampu membantu menciptakan kesetaraan dalam kehidupan sosial.

2.1.4 Jenis Sekolah

Berdasarkan lembaga yang menyelenggarakan, menurut KEMDIKBUD (Kemdikbud, 2017) sekolah di Indonesia terdiri menjadi:

a. Sekolah Negeri

Sekolah Negeri merupakan sekolah dengan lembaga pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. Lembaga pendidikan ini terdiri dari berbagai satuan pendidikan. Jenjang sekolah terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, serta Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Luar Biasa. Sekolah Negeri juga merupakan sekolah yang pembinaan, penyelenggaraan, dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah.

b. Sekolah Swasta

Sekolah Swasta merupakan sekolah dengan lembaga pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan, juga terdiri dari berbagai satuan pendidikan. Jenjang sekolah terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, serta Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Luar Biasa. Sekolah swasta juga merupakan sekolah yang penyelenggaraan maupun pengelolaannya dilakukan oleh yayasan atau badan sosial yang didirikan oleh masyarakat, namun pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan jenjang atau tingkatannya, menurut KEMDIKBUD (Kemdikbud, 2017) sekolah di Indonesia terdiri menjadi:

- Taman Kanak-kanak

Taman Kanak-kanak, atau yang sering disingkat sebagai TK merupakan satuan pendidikan prasekolah yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah.

- Bustanul Athfal atau Raudatul Athfal

Bustanul Athfal (disingkat BA) atau Raudatul Athfal (disingkat RA merupakan satuan pendidikan prasekolah tergolong jenis pendidikan keagamaan yang berciri khas agama Islam dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

- Sekolah Dasar

Sekolah Dasar atau yang sering disingkat sebagai SD, merupakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 6 tahun.

- Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah Ibtidaiyah atau yang sering disingkat menjadi MI, merupakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar tergolong jenis pendidikan keagamaan yang berciri khas agama Islam setara dengan SD dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

- Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Pertama atau yang sering disingkat menjadi SMP, merupakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dengan program 3 tahun dan merupakan kelanjutan dari SD.

- Madrasah Tsanawiyah

Madrasah Tsanawiyah atau yang sering disingkat menjadi MTs, merupakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar tergolong jenis pendidikan

keagamaan yang berciri khas Agama Islam, setara dengan SMP dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

- Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Atas atau yang sering disingkat menjadi SMA, merupakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dengan jenis pendidikan umum yang menyelenggarakan program 3 tahun dan merupakan lanjutan dari SMP.

- Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sering disingkat menjadi SMK, merupakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dengan jenis pendidikan kejuruan yang menyelenggarakan program 3 tahun dan merupakan kelanjutan dari SMP.

- Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah atau yang sering disingkat menjadi MA, merupakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah tergolong jenis pendidikan keagamaan yang berciri khas Agama Islam, setara dengan SMA dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

2.1.5 Elemen Interior Sekolah

a. Lantai

Hunt, (1980) menyatakan bahwa lantai merupakan permukaan bawah dalam bangunan atau ruangan, tetapi tidak selalu horizontal, yang mana furniture dan benda lain mungkin ditempati beberapa orang yang berjalan.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 menyatakan bahwa standar teknis pembangunan gedung sekolah di setiap ruang khususnya lantai memiliki syarat, yaitu:

- Menggunakan keramik berwarna terang pada ruang kelas, perpustakaan, kantin dan ruang kegiatan lainnya, sedangkan pada teras atau ruangan luar menggunakan keramik *doff* yang berwarna lebih gelap
- Plesteran yang dilapisi acian Portland cement yang diratakan halus
- Pada aula (panggung) menggunakan papan kayu dengan tebal 2 cm (KEMENDIKBUD, 2009).

b. Dinding

Dinding adalah penghalang yang merupakan batas sirkulasi, memisahkan satu ruang dengan ruang disebelahnya dan menyediakan privasi visual maupun akustik bagi pemakainya (Ching, 1996).

Berdasarkan data KEMENDIKBUD mengenai standar dalam penggerjaan dinding pada sekolah memiliki beberapa syarat, yaitu:

- Dinding pada setiap ruang sekolah harus diplester yang kedap air
- Pada ruang kelas, perpustakaan, kantin dan ruang yang sering digunakan untuk melakukan kegiatan, dinding dilapisi keramik atau cat tembok yang mudah dibersihkan
- Pada area koridor, teras dan ruangan yang berada di luar menggunakan dinding dengan finishing keramik atau cat anti air yang di letakkan di bawah dinding supaya tidak mudah kotor (KEMENDIKBUD, 2009).

c. Plafon

Plafon/langit-langit/*ceiling* adalah sebuah bidang atau permukaan yang terletak di atas garis pandang normal manusia, berfungsi sebagai pelindung (penutup) lantai atau atap dan sekaligus sebagai pembentuk ruang dengan bidang yang ada di bawahnya. Dengan jarak ketinggian tertentu dalam bangunan, plafon sebagai elemen penutup utama pada bidang atas sebagai pembentuk atap bangunan (Suptandar, 1999).

Dalam pengerjaan konstruksi plafon, terdapat beberapa syarat yang diberikan

- Rangka plafon menggunakan kayu yang kuat
- Penutup plafon dapat menggunakan asbes datar, triplek atau bahan lain yang memenuhi persyaratan dan aman untuk murid saat kegiatan belajar mengajar (KEMENDIKBUD, 2009).

2.2 Tinjauan Khusus

2.2.1 Budaya Korea Selatan

2.2.1.1 Definisi

Menurut Wibowo yang dikutip oleh Sumarto (2018), budaya merupakan pola asumsi dasar sekelompok masyarakat atau cara hidup orang banyak/pola kegiatan manusia yang secara sistematis diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya.

Budaya adalah suatu konsep yang membangkit minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa

yang patut menurut budayanya dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa budaya korea merupakan cara hidup yang menggambarkan identitas dari bangsa Korea Selatan itu sendiri (Syaiful, 2013).

2.2.1.2 Sejarah

Dalam artikel yang ditulis oleh Cindrakasi (2021), setelah melewati sejarah panjang penjajahan di Korea beberapa tahun silam, Korea mulai mengejar ketertinggalannya dengan berbagai usaha untuk mengembangkan dan memajukan negaranya. Perkembangan di Korea berpusat pada segala bidang, termasuk budaya. Korea mengadopsi banyak budaya negara lain seperti gaya hidup Amerika begitu pula dengan sistem pendidikannya, menerapkan filosofi budaya Eropa dan juga modernitas yang dianut oleh budaya Jepang (*Korean Culture and Information Service*, 2011). Korea Selatan menjadi salah satu negara di dunia yang dianggap berhasil dalam menggunakan dan mempromosikan produk budaya yang dimiliki sebagai bentuk kekuatan baru negaranya. Korea Selatan mulai mengenalkan, menyebarkan dan mempromosikan produk budaya yang dimiliki seperti film, drama, animasi, *game online*, musik, fashion maupun makanan sebagai bentuk kebijakan resmi Pemerintah Korea Selatan untuk membantu meningkatkan perekonomian Korea Selatan (Hat, et.all, 2008).

2.2.1.3 Proses Masuknya Budaya Korea

Proses masuknya budaya Korea dikaitkan dengan aktivitas diplomasi, dimana menurut Jian Wang yang dikutip oleh Henida (2009) menyebutkan 3 level aktivitas diplomasi publik yang membutuhkan keterlibatan aktor-aktor yang berbeda di mana budaya beroperasi dalam ketiganya, yaitu: 1) mempromosikan tujuan dan kebijakan negara, utamanya dilakukan oleh aktor nasional; 2) mengkomunikasikan ide dan cita-cita negara, serta keyakinan dan nilai-nilai bangsa, dilakukan oleh aktor nasional dan sub nasional; dan 3) membangun pemahaman dan hubungan umum, utamanya dilakukan oleh aktor sub-nasional (Bound, et.al, 2007). Diperlukan kemampuan menyampaikan budaya dengan komunikasi yang baik untuk sampai pada ketiga level aktivitas diplomasi tersebut. Melalui hal tersebut masyarakat mampu mengembangkan kesadaran dan ketertarikan akan budaya dari negara yang melakukan diplomasi.

Selain itu gelombang Korea telah menjadi fenomena global yang berpengaruh sejak awal abad 21, dan sangat mempengaruhi budaya kontemporer di berbagai industri media massa, seperti; industri musik, industri film, industri televisi dan aspek perilaku berbagai orang di seluruh dunia. Hal ini disebut dengan istilah *Korean Wave*. Pada pertengahan 1999 *Korean Wave* diciptakan di Tiongkok oleh jurnalis Beijing yang dikejutkan oleh popularitas yang berkembang pesat hiburan dan budaya Korea di Cina. Dari sebuah budaya menjadi sebuah *brand image*, itulah *Korean Wave*. Sebuah kampanye yang sangat menarik melalui berbagai macam cara untuk memperkenalkan Negara Korea Selatan (Zakiah, 2019)

2.2.1.4 Budaya Korea di Indonesia

Darmista (2015) menyatakan bahwa cukup banyak pekerja Indonesia yang bekerja di Korea, begitupun banyak juga orang Korea yang berinvestasi serta tinggal di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia dianggap sebagai salah satu negara penting yang menjadi target penyebaran kebudayaan Korea.

Kecintaan pada budaya Korea, juga terbentuknya akulturasi budaya Korea di Indonesia disebabkan oleh gencarnya persebaran (difusi) budaya Korea tersebut. *Hallyu* atau *Korean Wave* menumbuhkan fenomena demam Korea yang disebarluaskan melalui *Korean Pop Culture* ke seluruh penjuru dunia lewat media massa, dan yang terbesar lewat jejaring sosial dan platform berbagai video *online*, yang memungkinkan industri hiburan Korea menjangkau khalayak dunia yang cukup besar. Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan media ini mampu memfasilitasi promosi, distribusi dan konsumsi berbagai bentuk hiburan korea (Zakiah, 2019)

Ariffin (2013) menjelaskan bahwa budaya Korea yang berkembang dan terserap pada masyarakat Indonesia yaitu budaya popular Korea atau yang sering disebut dengan *Korean Wave* atau *Hallyu*. *Korean Wave*, dikenal juga dengan *Hallyu*, adalah popularitas sebuah budaya populer dari Korea Selatan yang juga populer di negara-negara Asia lainnya maupun di Barat. Budaya populer Korea seperti drama-drama televisi, film-film, dan musik pop disebut sangat kuat pengaruhnya. Drama-drama televisi adalah salah satu yang menjadi ikon budaya populer dalam *Korean Wave* ini. Indikator *Korean Wave* yaitu : 1. *Role Model*

(Panutan), 2. *Expression of Idolization* (Peniruan dan Pengetahuan & Pola Konsumsi).

2.2.2 Sistem Pendidikan Korea

2.2.2.1 Definisi Sistem Pendidikan Korea

Menurut Mee-Ryang & Woojin (2018) menyatakan, pendidikan Korea Selatan pada tahun 1945 sampai akhir 1950-an bertugas untuk mengembalikan pendidikan pada jalurnya. Otoritas pendidikan mencari dan mempekerjakan guru dan pejabat yang menggantikan para guru dan pejabat di masa kolonial Jepang. Korea Selatan meluncurkan sistem pendidikan bangsa pada pemerintahan baru tahun 1948. Selanjutnya pada Undang-undang pendidikan Korea Selatan tahun 1949 sistem sekolah didasarkan pada sistem tangga jalur tunggal yakni 6-3-3-4 yang berarti bahwa sekolah dasar (enam tahun), sekolah menengah (tiga tahun), sekolah menengah atas (tiga tahun) dan universitas (empat tahun). Pada akhirnya terjadi perubahan pada jenjang pendidikan menengah dimana siswa diizinkan memilih jalur akademisi atau vokasi/kejuruan.

2.2.2.2 Tujuan Sistem Pendidikan Korea

Penyusunan undang-undang pendidikan merupakan salah satu keputusan Dewan Nasional Republik Korea tahun 1948. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, tujuan pendidikan Korea Selatan adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa Identitas Nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan Nasional; (menyempurnakan kepribadian setiap warga Negara, mengembangkan cita-cita

persaudaraan yang universal mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia; dan menanamkan sifat patriotisme (Muhtadi, N.D)

2.2.2.3 Model Sistem Pendidikan Korea

Mengutip dari website Kedutaan Besar Korea Selatan, <https://overseas.mofa.go.kr/> sistem pendidikan di Republik Korea terdiri dari satu hingga tiga tahun masa prasekolah dan taman kanak-kanak, enam tahun sekolah dasar, tiga tahun sekolah menengah pertama, tiga tahun sekolah menengah atas, empat tahun sekolah tinggi atau universitas, yang juga menawarkan kuliah-kuliah pascasarjana untuk memperoleh gelar doktor. Terdapat juga sekolah tinggi dengan masa pendidikan dua sampai tiga tahun (*junior college*) dan sekolah tinggi kejuruan (*vocational college*). Rata-rata jumlah siswa terdaftar hampir 100%, hal ini dikarenakan pendidikan di sekolah dasar bersifat wajib.

Ada dua macam sekolah menengah atas di Korea: umum dan kejuruan. Calon siswa yang memilih sekolah menengah atas kejuruan (meliputi pertanian, teknik, perdagangan, studi kelautan dan ekonomi rumah tangga) bisa diterima melalui ujian masuk yang diselenggarakan oleh tiap sekolah Kurikulum pada sekolah-sekolah kejuruan biasanya 40-60 persen mata pelajaran umum sedangkan sisanya adalah mata pelajaran yang berhubungan dengan bidang keahlian kejuruan. Di antara sekolah-sekolah menengah atas umum, terdapat beberapa sekolah khusus dalam bidang kesenian, pendidikan olahraga, sains, dan bahasa asing. Tujuan dari sekolah-sekolah ini adalah untuk menyediakan pendidikan yang tepat untuk murid-murid

dengan bakat-bakat istimewa dalam bidang-bidang tersebut (Kedutaan Besar Korea Selatan, N.D)

Nisania (2022) menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Korea Selatan memiliki kurikulum nasional yang dipantau Kementerian Pendidikan yang setiap 5-10 tahun akan direvisi. Kurikulum utama terdiri dari sembilan mata pelajaran utama, yaitu:

- a. Pendidikan Moral
- b. Bahasa Korea
- c. Studi Sosial
- d. Matematika
- e. Sains
- f. Pendidikan Jasmani
- g. Musik
- h. Seni Rupa
- i. Seni praktis

2.2.3 Sistem Pendidikan Indonesia

2.2.3.1 Definisi Sistem Pendidikan Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dari pendidikan anak-anak bangsa diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, selain itu pendidikan juga mengajarkan anak didik untuk dapat berpola pikir kearah yang lebih baik. Dengan adanya pendidikan diharapkan anak-anak bangsa yang mendapatkan pendidikan mampu menghasilkan warga yang

produktif, cerdas, berbudi luhur, dan berkarakter. Pada dasarnya pendidikan bermutu dan berkualitas bagi setiap anak adalah tujuan dan impian dari semua negara yang ada di dunia ini. Semua negara berupaya memberikan segala yang dimilikinya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi warganya.

Di Indonesia pendidikan merupakan salah satu hak anak, hal ini dinyatakan dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yaitu “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Dinyatakan kembali dalam UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyebutkan bahwa “Setiap warga berusia tujuh tahun sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” (Pasal 6 ayat 1) dan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” (Pasal 11 ayat 2).

2.2.3.2 Tujuan Sistem Pendidikan Indonesia

UUSPN nomor 20 Tahun 2003 mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bermokratis serta bertanggung jawab.

2.2.3.3 Model Sistem Pendidikan Indonesia

Dengan diimplementasikannya Kurikulum 2013 sebagai pengganti kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maka tentu saja akan terjadi sejumlah perubahan dalam sistem Pendidikan di Indonesia, salah satunya terkait mata pelajaran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 77I, bahwa mata pelajaran yang akan diterapkan di Sekolah Dasar dan Sederajat yaitu:

- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Bahasa;
- d. Matematika;
- e. Ilmu Pengetahuan Alam;
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial;
- g. Seni Dan Budaya;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
- i. Keterampilan/Kejuruan; dan
- j. Muatan Lokal.

Salah satu perubahan yang paling terlihat dan bisa ditemukan dari kurikulum 2013 pada jenjang Sekolah Dasar (SD), adalah diterapkannya sistem pembelajaran berbasis tematik integratif. Pembelajaran terpadu: tematik, adalah salah satu bentuk

atau model dari pembelajaran terpadu, yaitu model terjala (*webbed*), yang pada intinya menekankan pada pola pengorganisasian materi yang terintegrasi dipadukan oleh suatu tema. Tema diambil dan dikembangkan dari luar mata pelajaran tapi sejalan dengan kompetensi dasar dan topik-topik (standar isi) dari mata pelajaran. Keberhasilan penerapan model pembelajaran terpadu: tematik itu sendiri, diantaranya sangat dipengaruhi oleh keterterapan prinsip-prinsip pembelajaran terpadu itu sendiri. Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki beberapa metode mengajar yang biasa digunakan. Metode adalah cara atau Teknik untuk mencapai tujuan khusus tertentu. Biasanya dalam pembelajaran terdapat lebih dari satu tujuan khusus, dan tentunya akan memerlukan lebih dari satu metode yang bisa digunakan untuk mencapai lebih dari satu tujuan (Kurniawan, 2014).

2.2.4 Konsep Penggabungan Kultur

2.2.4.1 Definisi Konsep Penggabungan Kultur

Menurut Al-Barry yang dikutip oleh Panggabean (2005) penggabungan kultur atau yang disebut dengan akulterasi merupakan sebuah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, Sebagian mengadopsi secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu, dan Sebagian berusaha menolak pengaruh itu. Hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa di antara anggota-anggota masyarakat yang berakulterasi ditandai oleh peminjaman atau pengadopsian (bilingualisme).

Menurut Soekanto yang dikutip oleh Panggabean (2005) menyebutkan bahwa akulterasi adalah proses pertemuan unsur-unsur dari berbagai kebudayaan yang

berbeda-beda, yang diikuti dengan percampuran unsur-unsur tersebut, perbedaan antara unsur-unsur asing dengan yang asli masih tampak. Akulturasi mengacu kepada pengaruh suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain atau saling mempengaruhi antara kebudayaan yang mengadakan kontak.

Dapat disimpulkan bahwa penggabungan kultur merupakan sebuah percampuran antara dua budaya atau lebih yang berjalan secara beriringan tanpa menghilangkan budaya satu sama lain.

2.2.4.2 Tujuan Konsep Penggabungan Kultur

Menurut Skeel yang dikutip oleh Ibrahim (2013), tujuan konsep pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi:

- a. untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam
- b. untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan
- c. memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya
- d. untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.

2.2.4.3 Proses Konsep Penggabungan Kultur

Zaitun (2015) menyebutkan bahwa sekolah merupakan suatu sistem sosial yang mempunyai organisasi yang unik dan pola relasi diantara para anggotanya yang bersifat unik, karena tiap-tiap sekolah memiliki aturan tata tertib, kebiasaan, upacara-upacara, mars/hymne sekolah, pakaian seragam dan lambang-lambang yang lain yang memberikan corak khas kepada sekolah yang bersangkutan sebagai suatu kebudayaan sekolah.

Moerdiyanto (2012) menyatakan, kultur sekolah bersifat dinamis. Perubahan pola perilaku dapat mengubah sistem nilai dan keyakinan pelaku. Kultur sekolah beroperasi secara tidak disadari oleh para pendukungnya dan telah lama diwariskan secara turun temurun. Kultur mengatur perilaku dan hibungan internal serta eksternal. Kultur sekolah hanya dapat dikenali dari pencerminannya dalam berbagai hal yang dapat diamati, yaitu:

- a. Perilaku verbal yaitu ungkapan-ungkapan lisan dan tertulis baik dalam bentuk kata-kata atau kalimat baik yang dikatakan oleh kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan maupun oleh siswa di setiap kesempatan, maupun dalam bentuk-bentuk slogan yang ditulis dan dipampang di berbagai sudut kampus sekolah yang strategis dan mudah dibaca.
- b. Perilaku nonverbal yaitu ungkapan dalam bentuk perbuatan yang baik seperti sopan santun, jujur, kerjasama yang harmonis, saling menghargai, semangat untuk berprestasi, peduli terhadap lingkungan, berlaku hemat tidak boros, menjunjung tinggi gotong royong, taat pada aturan, disiplin waktu, rajin belajar, cinta tanah air, serta membela kesatuan dan persatuan bangsa.

- c. Benda hasil budaya yaitu arsitektur kampus sekolah, interior dan eksterior, lambang sekolah, tata ruang, bentuk mebel dan sarana sekolah lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa proses penggabungan kultur dapat terjadi karena perubahan pola perilaku dari pelaku (warga sekolah). Proses penggabungan kultur dapat terjadi secara terlihat dan tidak tersirat melalui kegiatan yang dilakukan warga sekolah, maupun benda-benda fisik yang berada pada sekolah tersebut.

2.2.4.4 Penggabungan Kultur dalam Pendidikan – Sistem Multikultur dalam Pendidikan

Baik secara sadar ataupun tidak, setiap anak datang ke sekolah dengan identitas etnik (suku bangsa) masing-masing. Hal ini akan menjadi sebuah pertimbangan dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas, yaitu untuk mengakui dan menerima perbedaan. Sama pentingnya ketika siswa mengenali dan menghargai kesukubangsaan mereka dan belajar menghargai orang lain dalam kelas. Pengenalan pada masing-masing identitas etnik merupakan poin awal, hal ini merupakan penghubung antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lain sehingga seluruh anggota sekolah merasa nyaman akan keberadaan masing-masing. (Hartono, 2018).

Mengutip dari Zaitun (2015) ketika murid menghabiskan waktu di sekolah dan terpisah dari kehidupan keluarganya, maka saat itu terjadilah sub-kebudayaan. Dalam situasi serupa ini dapat berkembang pola kelakuan yang khas bagi peserta didik yang tampak dari pakaian, bahasa, kebiasaan kegiatan-kegiatan serta upacara-upacara. Sebab lain timbulnya kebudayaan sekolah ialah tugas sekolah yang khas

yakni mendidik anak dengan menyampaikan sejumlah pengetahuan, sikap, ketrampilan yang sesuai dengan kurikulum dengan metode dan teknik kontrol tertentu yang berlaku di sekolah.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap anak datang dari keberagaman identitas atau kebudayaan yang berbeda, sehingga setiap anak memiliki keunikan. Maka dengan itu, sekolah harus dapat mengakomodasikan semua keberagaman tersebut, salah satunya dengan cara mengenali kultur bangsa.